

Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Sugito¹; Subagio S Waluyo²; Anisa Pramitasari³

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Krisnadwipayana

²Program Studi Administrasi Publik, Universitas Krisnadwipayana

³Program Studi Administrasi Publik, Universitas Krisnadwipayana

Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: 15 Agustus 2023</p> <p>Accepted: 26 Juni 2023</p> <hr/> <p>Keywords Management, Household Waste, Collaborative Governance</p> <p>DOI:</p>	<p><i>This research aims to determine the strategy of domestic waste management in Jatiasih sub-District of Bekasi City, in this case whether collaborative governance theory has been applied in domestic waste management in Jatiasih sub-District of Bekasi City. This research use descriptive qualitative method, where data collection techniques are carried out by conducting interviews, documentation and observation. In collecting data, the researcher chose informants using purposive sampling technique where the researcher selected 6 (six) informants, namely 1 (one) Head of Technical Implementation Unit of The Environmental Service Office of Jatiasih sub-District or later called UPTD LH Jatiasih sub-District, 1 (one) person business actor, 1 (one) trash bank activist and 3 (three) community members.</i></p> <p><i>The results showed that the strategy of domestic waste management in Jatiasih sub-District of Bekasi City has not applied the collaborative governance theory as a whole. In the domestic waste management, the UPTD LH Jatiasih sub-District has not optimally involved the community members in the strategy of domestic waste management in Jatiasih sub-District of Bekasi City. This relates to the fact that indicators in the collaborative governance process have not yet been fully implemented. The domestic waste management in Jatiasih sub-District of Bekasi City still faces various problems.</i></p>

PENDAHULUAN

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Bekasi pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Bekasi di 12 Kecamatan sebanyak 2.873.484 jiwa. Kota Bekasi tidak hanya dijadikan sebagai wilayah pemukiman tetapi juga sebagai wilayah perdagangan, jasa dan perindustrian. Kota Bekasi tidak hanya ditempati oleh penduduk tetap tetapi juga ditempati oleh penduduk sementara yang bekerja di wilayah Kota Bekasi. Akibatnya, produksi sampah rumah tangga Kota Bekasi senantiasa membengkak dan menjadi permasalahan utama pada Kota Bekasi. Pada tahun 2018 saja, rata-rata produksi sampah yang dihasilkan warga Kota Bekasi bias mencapai 900 ton per hari. Dari banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan tersebut tidak dapat ditampung seluruhnya karena TPA Sumur Batu sendiri sudah hampir penuh. Hal ini menjadi permasalahan pelik yang mengakibatkan adanya tumpukan sampah liar dimana-mana salah satunya di wilayah Kecamatan Jatiasih.

Dari informasi yang dihimpun melalui wawancara, armada truk pengangkut sampah di Kecamatan Jatiasih yang berjumlah 12 unit dianggap kurang untuk mengangkut sampah rumah tangga tersebut khususnya pada saat menjelang hari raya ketika jumlah sampah membludak. Sampah rumah tangga sebagian besar langsung dibuang tanpa dipilah terlebih dahulu sesuai jenisnya. Sebagian masyarakat malas untuk memilah sampah terlebih dahulu karena dianggap merepotkan. Sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang masih menggunakan sistem berbayar berupa retribusi bulanan membuat sebagian masyarakat lebih memilih membuang sampahnya di sembarang tempat. Keterbatasan lahan TPA Sumur Batu juga menjadi penyebab tidak terangkutnya sampah-sampah rumah tangga di lingkungan masyarakat khususnya di Kecamatan Jatiasih. Di Kecamatan Jatiasih belum ada tempat pembuangan sampah terpadu, yang ada hanya tempat penampungan sementara dan tidak setiap hari diangkut untuk dikirim ke TPA Sumur Batu. Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi. Penjelasan tersebut seharusnya menjadi dasar agar Pemerintah Daerah dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Jatiasih atau yang kemudian disingkat menjadi UPTD LH Kecamatan Jatiasih untuk melibatkan dunia usaha dan masyarakat sipil dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga. Bank sampah sebagai mitra kerja UPTD LH Kecamatan Jatiasih juga banyak yang tidak aktif dalam kegiatan mengolah sampah. Saat ini kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, bank sampah dan masyarakat sipil di wilayah Kecamatan Jatiasih dinilai kurang sehingga pengelolaan sampah rumah tangga masih belum maksimal dan mengandalkan para petugas kebersihan.

Melihat kondisi pengelolaan sampah rumah tangga saat ini yang belum maksimal, seharusnya tata kelola pemerintahan atau collaborative governance sudah mulai diterapkan oleh UPTD LH Kecamatan Jatiasih. Dampak dari pengelolaan sampah yang tidak dilakukan secara kolaborasi tersebut diantaranya adalah kurang maksimalnya pengelolaan sampah tersebut, semakin beratnya pekerjaan pemerintah dalam mengelola sampah, pemborosan anggaran pengelolaan sampah, semakin minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, semakin meningkatnya produksi kemasan satu kali pakai yang dihasilkan pihak swasta. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas serta melihat visi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yakni Bekasi kota yang nyaman, hijau, bersih dan berbudaya lingkungan membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Strategi

Dalam dunia militer strategi merupakan ilmu untuk merencanakan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan militer dalam jumlah yang besar dan pergerakan kekuatan-kekuatan ke dalam posisi yang menguntungkan sebelum pertempuran dimulai (Udaya, 2013:6).

Sementara menurut Salusu (1996:88) strategi merupakan penetapan sasaran organisasi dalam jangka panjang serta implementasi rangkaian tindakan-tindakan dengan menggunakan sumber daya yang penting untuk mencapai target organisasi. Tidak jauh berbeda dengan pengertian tersebut, Rangkuti (2013:183) mengatakan bahwa strategi adalah perencanaan induk secara keseluruhan yang menerangkan bagaimana organisasi akan mencapai semua tujuan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Mangkuprawira (2004:14) menjelaskan pengertian strategi secara umum yaitu sebagai suatu cara yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan. Hal tersebut menggambarkan bahwa penggunaan strategi tidak sebatas pada organisasi swasta dalam mencari keuntungan tetapi juga dipakai oleh organisasi publik dalam rangka mencapai tujuan organisasinya salah satunya dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Dalam arti luas strategi merupakan upaya untuk mengarahkan bagaimana suatu organisasi memanfaatkan lingkungan dan sumber daya yang dimiliki serta memilih upaya apa yang dilakukan agar pengorganisasian secara internal dapat disusun dan direncanakan bagi pencapaian tujuan organisasi. Dari penjelasan-penjelasan diatas strategi dapat disimpulkan sebagai perencanaan yang di dalamnya terdapat kumpulan dari cara-cara yang dirumuskan untuk mencapai berbagai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi tidak hanya menunjukkan cara tetapi juga dapat menunjukkan teknik operasionalnya dalam mencapai tujuan tersebut.

Pengertian Sampah

Nugroho (2013:39) menyatakan bahwa sampah merupakan material akhir yang tidak dikehendaki dari sebuah proses yang telah berlangsung. Sementara dalam Pasal 1 pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa sampah adalah sisa dari kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pada Pasal 2 disebutkan pula ruang lingkup dari sampah khususnya sampah rumah tangga yakni sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga namun tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Pada dasarnya sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah melewati perlakuan tertentu, telah diambil bagian terpentingnya, telah diolah dan sudah tidak bermanfaat. Jumlah sampah tersebut sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang yang digunakan (Slamet, 2002:14). Sampah yang terus dibiarkan akan menimbulkan resiko-resiko yang buruk karena sampah hanya akan menjadi beban bagi bumi (Hadi, 2000:40).

Jumlah sampah yang terus bertambah apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang baik akan menyebabkan kerusakan dan dapat mencemari lingkungan. Sebagian masyarakat menganggap sampah sudah tidak memiliki harga serta dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian alam pada segi lingkungan hidup namun, sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat sampah tidak lagi dipandang sebelah mata. Sampah mulai dilirik dan dimanfaatkan kembali agar lebih berguna dan bernilai ekonomis serta tidak mencemari lingkungan hidup. Sampah rumah tangga yang awalnya dianggap sebagai limbah dapat bermanfaat kembali. Nugroho (2012:41-53) menjelaskan

bahwa sampah dibagi menjadi beberapa jenis yaitu jenis sampah berdasarkan sumbernya, sifatnya dan bentuknya.

Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Penerapan prinsip pengelolaan sampah menjadi salah satu strategi pengelolaan sampah rumah tangga. Prinsip tersebut yaitu Prinsip 3R yang sudah umum dikenal masyarakat, sementara Nugroho (2013:62-64) menjelaskan bahwa prinsip pengelolaan sampah tidak cukup sebatas 3R tetapi sudah mencapai 5R. Adapun prinsip 5R tersebut yaitu (1) Reduce; (2) Reuse; (3) Recycle; (4) Replace; (5) Respect. Penerapan prinsip Respect ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap lingkungan agar dapat menumbuhkan sikap bijaksana dan kepedulian terhadap kelestarian dan kebersihan lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip 5R dalam pengelolaan sampah ini diharapkan dapat menekan produksi sampah sebelum diproduksi barang-barang penghasil sampah itu sendiri. Manusia diajak untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih bijaksana dalam penggunaan suatu barang dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Jatiasih telah didukung oleh peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga maupun Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah rumah tangga yang telah diamanatkan dalam ketiga peraturan tersebut bukanlah tanggung jawab UPTD LH Kecamatan Jatiasih saja selaku pihak pemerintah melainkan menjadi tanggung jawab semua pihak baik swasta maupun masyarakat selaku produsen awal dari sampah itu sendiri. Dalam pengelolaan sampah rumah tangga, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi harus merumuskan strategi yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan menggunakan pendekatan yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup semestinya menerapkan pendekatan collaborative governance dalam pengelolaan sampah rumah tangga guna memudahkan pekerjaan UPTD LH Kecamatan Jatiasih dan kecamatan lainnya dalam memaksimalkan program pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bekasi.

Dalam pendekatan collaborative governance, Pemerintah dalam hal ini UPTD LH Kecamatan Jatiasih diharapkan mampu menjalin kolaborasi dengan pihak swasta sekaligus dengan masyarakat sipil. Dalam kerjasama kolaborasi tersebut terjadi penyamaan cita-cita, tujuan, strategi dan kegiatan dari semua pemangku kepentingan tetapi saling memiliki otoritas dalam mengambil keputusan secara mandiri serta dalam mengelola organisasi atau kelompoknya walaupun setiap pemangku kepentingan tunduk terhadap keputusan yang diambil dari kesepakatan bersama (Dwiyanto, 2011:251). Wulandari dan Titik (2011:35) menjelaskan bahwa semua elemen baik itu pemerintah, pihak swasta, masyarakat sipil maupun komunitas masyarakat sipil saling berpartisipasi secara aktif dan penuh dalam

proses pengambilan keputusan sesuai fungsinya masing-masing. Pendapat lain menyatakan bahwa collaborative governance merupakan sebuah pengaturan yang mengatur satu lembaga publik atau lebih dan melibatkan lembaga non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan musyawarah yang bertujuan untuk merumuskan atau menerapkan suatu kebijakan publik atau mengelola aset publik (Ansell dan Gash, 2007:554).

Ansell dan Gash (2007:544-545) mengatakan collaborative governance terdiri dari enam kriteria yaitu terdapat dialog atau musyawarah yang diinisiasi oleh lembaga publik atau pemerintah, terdapat aktor non-pemerintah didalam dialog atau musyawarah tersebut, partisipan tidak sekedar berkonsultasi dengan pemerintah tetapi dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, dialog tersebut diorganisir secara formal dengan pertemuan diadakan secara rutin, keputusan yang dihasilkan merupakan hasil dari kesepakatan, fokus utama dari kolaborasi tersebut adalah kebijakan publik ataupun manajemen publik. Lebih lanjut Ansell dan Gash (2007,557-561) menjelaskan bahwa collaborative governance berjalan melalui sebuah proses yang diawali melalui dialog secara langsung yang terdiri dari semua pemangku kepentingan, membangun rasa saling percaya antara pemangku kepentingan, kemudian para pemangku kepentingan membuat komitmen pada setiap proses, setiap pemangku kepentingan juga membangun pemahaman bersama sehingga muncul rasa tanggung jawab bersama dalam menangani permasalahan yang ada sehingga pada akhirnya menghasilkan manfaat dalam kolaborasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam mengumpulkan data peneliti memilih informan dengan teknik purposive sampling dimana peneliti memilih informan sebanyak 6 (enam) informan yaitu pihak 1 (satu) orang Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Jatiasih atau yang kemudian disebut UPTD LH Kecamatan Jatiasih, 1 (satu) orang pelaku usaha, 1 (satu) orang pegiat bank sampah dan 3 (tiga) orang masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada UPTD LH Kecamatan Jatiasih karena lokasi tersebut merupakan rujukan yang paling tepat untuk mencari tahu strategi pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Penelitian ini berfokus pada keingintahuan peneliti tentang strategi pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Penerapan collaborative governance dalam pengelolaan sampah rumah tangga sudah seharusnya dimulai sejak dini. Masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai pelaksana kebijakan tetapi juga sebagai perumus kebijakan. Langkah ini bertujuan agar kebijakan yang dibuat tidak hanya kebijakan yang berorientasi top-down tetapi kebijakan yang benar-benar

bersumber dari masyarakat langsung karena masalah yang utama bersumber langsung dari masyarakat itu sendiri.

1. Komunikasi Dua Arah

Proses collaborative governance dalam pengelolaan sampah rumah tangga dimulai dengan diadakannya dialog tatap muka langsung. Dialog tersebut terdiri dari Pemerintah dan pihak swasta serta masyarakat. Dalam Dialog tatap muka langsung tersebut setiap pemangku kepentingan saling berkomunikasi langsung dimana kegiatan tersebut agar setiap pemangku kepentingan dapat mengkomunikasikan segala aspirasinya baik itu usulan maupun keluhan. Namun komunikasi langsung tersebut jarang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini UPTD LH Kecamatan Jatiasih. Komunikasi berupa penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi juga masih jarang terjadi.

2. Negosiasi

Didalam dialog atau musyawarah yang baik seharusnya terdapat negosiasi dengan itikad baik antar setiap pemangku kepentingan. Negosiasi tersebut dilakukan antara pihak swasta dan masyarakat dengan pihak pemerintah. Negosiasi tersebut berupa usulan atau kemauan masyarakat dimana usulan tersebut bertujuan untuk kemajuan pengelolaan sampah rumah tangga kedepannya. Pihak swasta dan masyarakat melakukan negosiasi dengan pihak UPTD LH khususnya ketika masyarakat mengajukan permintaan pelayanan kepada UPTD LH. Melalui negosiasi tersebut pemerintah bisa menjadikan usulan-usulan pihak swasta dan masyarakat sebagai bahan untuk merancang strategi pengelolaan sampah rumah tangga

3. Transparansi Proses

Transparansi dalam tata kelola pemerintahan mutlak dilakukan guna menjaga kepercayaan dari publik. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan, pemerintah belum maksimal dalam melakukan transparansi dimana ada beberapa keluhan warga yang sampai saat ini belum mengetahui tindak lanjutnya karena sampai saat ini belum ada perubahan.

4. Adanya Saling Ketergantungan

Dengan terjaganya kepercayaan publik dari transparansi yang dilakukan, setiap pemangku kepentingan akan merasakan adanya rasa ketergantungan satu sama lain. Setiap pemangku kepentingan sangat bergantung satu sama lainnya. Pemerintah membutuhkan keikutsertaan swasta dan masyarakat guna menjaga kebersihan lingkungan dan peningkatan pendapatan asli daerah, selain itu pemerintah juga membutuhkan hasil baik bagi peningkatan prestasi kerjanya. Pihak swasta dan masyarakat juga sangat membutuhkan peran pemerintah dalam hal ini UPTD LH agar sampah-sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh mereka dapat diangkut dan dikelola oleh UPTD LH.

5. Kepemilikan Bersama Atas Proses

Kepemilikan bersama atas proses yang peneliti maksud adalah adanya rasa memiliki, rasa tanggungjawab dan kepedulian terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Namun masyarakat masih kurang peduli tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini menjadi pekerjaan berat bagi pihak pemerintah untuk lebih aktif lagi memberikan sosialisasi kepada masyarakat langsung sesering mungkin.

6. Keterbukaan untuk Mengeksplorasi Keuntungan Bersama

Keuntungan bersama yang dimaksud disini ialah kebutuhan-kebutuhan dari tiap pemangku kepentingan yang ada khususnya pihak swasta dan masyarakat. Melalui tahap negosiasi pihak swasta dan masyarakat menyampaikan aspirasinya dimana aspirasi tersebut tidak hanya dalam bentuk keluhan tetapi juga dalam bentuk kebutuhan. Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pihak swasta dan masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya tersebut kepada pihak pemerintah dalam hal ini UPTD LH Kecamatan Jatiasih.

7. Adanya Misi Yang Jelas

Indikator adanya misi yang jelas berisi tentang pandangan-pandangan para pemangku kepentingan tentang pengelolaan sampah rumah tangga yang selama ini sudah dilakukan oleh UPTD LH Kecamatan Jatiasih. UPTD LH Kecamatan Jatiasih selaku pihak yang mengelola sampah rumah tangga di Kecamatan Jatiasih menilai bahwa selama ini pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan sudah berjalan baik. Berbeda dengan pendapat pihak UPTD LH tersebut, mayoritas masyarakat menilai pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Jatiasih belum berjalan maksimal dan belum memuaskan.

8. Definisi Masalah Umum

Definisi masalah umum berisi tentang masalah-masalah yang terjadi dan menjadi kendala bagi proses pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Jatiasih seperti jumlah kendaraan yang terbatas, daya tampung TPA Sumur Batu yang semakin berkurang menjadi masalah setiap harinya. Ditambah dengan masalah rendahnya kepedulian masyarakat dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan menjadikan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Jatiasih menjadi semakin berat.

9. Identifikasi Nilai-nilai Umum

Identifikasi nilai-nilai umum berisi tentang nilai-nilai apa saja yang digunakan oleh UPTD LH Kecamatan Jatiasih dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Jatiasih selama ini. Nilai kesehatan, nilai hukum dan nilai ekonomi menjadi dasar bagi pengelolaan sampah rumah tangga selama ini.

10. Small Wins

Indikator ini berisi tentang manfaat-manfaat yang dirasakan setiap pemangku kepentingan dan harapan-harapannya. Setiap kebijakan atau program yang dibuat dan dijalankan harus memberikan manfaat bagi masyarakat seluas-luasnya. Semua

pemangku kepentingan dapat merasakan manfaat yang baik apabila pengelolaan sampah rumah tangga dapat dilaksanakan secara maksimal.

11. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis mutlak dilakukan dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga dimana sampah rumah tangga merupakan sampah yang tidak berhenti diproduksi setiap harinya. Namun rencana yang dibuat menghadapi kendala. Hal ini menjadi pekerjaan rumah tambahan bagi pihak pemerintah agar semua pemangku kepentingan tetap mendapat manfaat dan tidak ada yang dirugikan dengan adanya pengelolaan sampah rumah tangga tersebut.

12. Menemukan Fakta Bersama

Indikator ini berisi tentang tindak lanjut UPTD LH atas semua laporan atau keluhan masyarakat serta swasta mengenai pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Jatiasih selama ini. Tindak lanjut yang cepat dibutuhkan agar pengelolaan sampah rumah tangga tetap berjalan baik dan maksimal memberikan manfaat bagi setiap pemangku kepentingan. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa UPTD LH cenderung lamban dalam menindaklanjuti setiap laporan atau keluhan masyarakat.

Masalah-Masalah Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dimana masyarakat masih banyak yang membuang sampah sembarangan sehingga mencemari lingkungan.
2. Masyarakat dan pihak swasta masih banyak yang belum mengerti mekanisme pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dan benar sehingga masih banyak yang membuang sampah tanpa diolah terlebih dahulu.
3. Sosialisai atau penyuluhan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dan benar masih belum rutin dan cenderung jarang dilakukan oleh pihak UPTD LH Kecamatan Jatiasih.
4. Jumlah truk pengangkut sampah yang terbatas membuat sampah rumah tangga yang setiap hari diproduksi tidak dapat terangkut seluruhnya sehingga masih menyisakan sampah di lingkungan masyarakat.
5. Antrian yang panjang dan kapasitas di TPA Sumur Batu yang semakin berkurang menjadi membuat pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Jatiasih terhambat..

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai strategi pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

sudah mulai menerapkan sistem collaborative governance tetapi proses collaborative governance belum diterapkan secara keseluruhan. Adapun indikator utama yaitu adanya dialog tatap muka langsung yang didalamnya berisi komunikasi dua arah dan negosiasi dengan itikad baik guna merancang strategi pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Jatiasih belum rutin dilaksanakan.

Adapun masalah-masalah lainnya yang ditemukan dalam penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dimana masyarakat masih banyak yang membuang sampah sembarangan sehingga mencemari lingkungan.
2. Masyarakat dan pihak swasta masih banyak yang belum mengerti mekanisme pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dan benar sehingga masih banyak yang membuang sampah tanpa diolah terlebih dahulu.
3. Sosialisasi atau penyuluhan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dan benar masih belum rutin dan cenderung jarang dilakukan oleh pihak UPTD LH Kecamatan Jatiasih
4. Jumlah truk pengangkut sampah yang terbatas membuat sampah rumah tangga yang setiap hari diproduksi tidak dapat terangkut seluruhnya sehingga masih menyisakan sampah di lingkungan masyarakat.
5. Antrian yang panjang dan kapasitas di TPA Sumur Batu yang semakin berkurang menjadi membuat pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Jatiasih terhambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Chris and Alison Gash. 2007. Collaborative Governance Theory and Practice
Journal of Public Administration Research and Theory (JPART).
- Dwiyanto, Agus. 2011. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif.
Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Hadi, Sudharto P. 2005. Demensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press
- Mangkuprawira, Sjafari. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Jakarta: PT
Graha Indonesia
- Nugroho, Panji. 2013. Panduan Membuat Pupuk Kompos Cair. Yogyakarta: Pustaka Baru
Press
- Rangkuti, Freddy. 2013. Riset Pemasaran. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Salusu, J. 1996. Pengambilan Keputusan Stratejik. Jakarta: Gramedia Widiasarana
Indonesia
- Slamet, Juli Soemirat. 2001. Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press

- Udaya, Jusuf. 2013. Manajemen Stratejik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wulandari dan Titik, S. 2011. Implementasi Manajemen Kolaboratif Dalam Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia. Vol 5 No. 1. 32-50. Diakses 16 Maret 2019.